

Profil Data Berbasis Gender Kabupaten Bengkayang

Analisis Strategis Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mendorong Pembangunan Inklusif

Bagian 1: Ringkasan Eksekutif dan Konteks Strategis

Pendahuluan

Laporan ini menyajikan profil data berbasis gender yang komprehensif untuk Kabupaten Bengkayang, dengan fokus khusus pada peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Analisis ini mengintegrasikan data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 untuk memetakan lanskap kesetaraan gender dan mengidentifikasi peluang intervensi kebijakan. Laporan ini bertujuan memberikan landasan berbasis bukti bagi para pemangku kepentingan, terutama Diskominfo, untuk merumuskan program yang lebih efektif dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sintesis Temuan Kunci

Analisis data menunjukkan sebuah paradoks dalam pembangunan gender di Kabupaten Bengkayang. Di satu sisi, daerah ini mencatat sejumlah indikator positif yang patut diapresiasi. Partisipasi perempuan dalam sektor Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat tinggi, bahkan melampaui laki-laki, dan didominasi oleh individu berpendidikan tinggi. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bengkayang juga tercatat di atas rata-rata provinsi, menandakan kemajuan dalam partisipasi politik dan ekonomi di tingkat formal.

Namun, di sisi lain, perempuan secara umum masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Terdapat kesenjangan yang lebar dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan di luar sektor pemerintahan, yang mengindikasikan adanya hambatan bagi perempuan untuk masuk ke pasar kerja. Isu kesehatan ibu dan anak, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) yang cenderung meningkat, serta prevalensi stunting yang masih tinggi, menunjukkan kerentanan pada aspek kesejahteraan dasar. Lebih jauh lagi, data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat mengisyaratkan adanya isu perlindungan yang mendesak untuk ditangani.

Peran Kritis Diskominfo

Dalam konteks ini, Diskominfo diposisikan sebagai aktor kunci yang memiliki potensi besar untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Mandatnya dalam diseminasi informasi, percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pengelolaan data

menempatkannya pada posisi unik untuk mendorong inklusi digital yang responsif gender. Namun, analisis menunjukkan bahwa potensi ini belum tergarap secara optimal. Program-program yang berkaitan dengan literasi digital masih cenderung terfragmentasi dan belum terintegrasi secara penuh dengan agenda pemberdayaan perempuan yang lebih luas yang dijalankan oleh dinas lain.

Rekomendasi Utama

Laporan ini merekomendasikan agar Diskominfo mengambil peran yang lebih proaktif sebagai integrator dan fasilitator pembangunan inklusif. Hal ini tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga mencakup pengembangan strategi literasi digital yang secara eksplisit menargetkan perempuan, pemanfaatan platform digital untuk pemberdayaan ekonomi, dan yang terpenting, pembangunan sistem data terpilah gender yang solid. Sistem data ini akan menjadi fondasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif dan adil di Kabupaten Bengkayang.

Bagian 2: Lanskap Demografi dan Sosial-Ekonomi Berbasis Gender

2.1. Komposisi dan Struktur Kependudukan

Analisis demografi merupakan titik awal untuk memahami dinamika gender di suatu wilayah. Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang adalah 298.979 jiwa. Dari jumlah tersebut, komposisinya terdiri dari 155.120 penduduk laki-laki dan 143.859 penduduk perempuan.

Struktur populasi ini menghasilkan Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) sebesar 108, yang berarti terdapat 108 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Bengkayang. Angka ini secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi, yang menandakan adanya dominasi populasi laki-laki. Rasio yang tidak seimbang ini memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor pendorongnya, seperti kemungkinan adanya pola migrasi tenaga kerja yang didominasi laki-laki ke sektor-sektor tertentu seperti perkebunan atau pertambangan. Lebih jauh, kondisi demografis ini berpotensi mempengaruhi dinamika sosial, pasar kerja, serta dapat meningkatkan potensi kerentanan sosial bagi perempuan.

2.2. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi tolok ukur utama kualitas hidup. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Bengkayang mencapai 67,87, menempatkannya dalam kategori "sedang". Capaian ini patut dicatat karena berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun yang sama (67,66) dan merupakan salah satu yang tertinggi di provinsi tersebut. Namun, data IPM Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 yang mencapai 69,41 menunjukkan adanya dinamika pembangunan regional yang terus bergerak maju.

Meskipun IPM secara umum positif, komponen pendidikannya menunjukkan tantangan. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Bengkayang pada tahun 2023 adalah 7,22 tahun, sedikit di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 7,71 tahun. Kesenjangan antara IPM yang relatif tinggi dengan RLS yang lebih rendah mengindikasikan bahwa capaian IPM kemungkinan besar ditopang oleh komponen lain, seperti standar hidup layak (pengeluaran per kapita) atau kesehatan (Angka Harapan Hidup). Hal ini dapat menyiratkan adanya ketimpangan, di mana pembangunan manusia yang tinggi mungkin belum merata dan hanya dinikmati oleh segmen populasi tertentu, sementara akses terhadap pendidikan formal yang lebih tinggi bagi masyarakat luas masih menjadi pekerjaan rumah.

2.3. Partisipasi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan memperlihatkan kesenjangan gender yang nyata. Berdasarkan data RPJMD tahun 2020, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di angka 63,29%, jauh di bawah TPAK laki-laki yang mencapai 87,24%. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa laki-laki masih dipandang sebagai pencari nafkah utama dan terdapat hambatan struktural maupun kultural yang membatasi partisipasi penuh perempuan dalam perekonomian.

Sebuah kontras yang tajam terlihat pada sektor publik. Partisipasi perempuan sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sangat tinggi, mencapai 51,9% pada tahun 2020, melampaui partisipasi laki-laki. Mayoritas ASN perempuan ini (87,4%) memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika akses dibuka secara setara seperti dalam rekrutmen ASN, perempuan memiliki kapabilitas dan daya saing yang tinggi. Namun, dominasi ini tidak terefleksikan di pasar kerja yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan harus difokuskan secara intensif pada sektor di luar pemerintahan, seperti UMKM, pertanian, dan sektor informal, di mana mayoritas angkatan kerja perempuan berada. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bengkayang secara umum tercatat sebesar 2,81% pada tahun 2024, dengan sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dan kontributor utama PDRB sebesar 33%.

2.4. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Sektor kesehatan menunjukkan gambaran yang beragam. Terdapat kemajuan signifikan dalam upaya penurunan prevalensi stunting, yang berhasil ditekan dari 32,7% pada tahun 2023 menjadi 23,4% pada tahun 2024, sebuah penurunan sebesar 9,3%. Meskipun demikian, angka ini masih berada di atas target nasional 14%.

Namun, isu kesehatan ibu dan anak lainnya masih menjadi tantangan serius. Meskipun Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan tren penurunan, Angka Kematian Bayi (AKB) justru meningkat. Pada tahun 2024, tercatat 74 kasus kematian bayi, yang setara dengan rasio 18,3 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab utamanya meliputi asfiksia, bayi berat lahir rendah (BBLR), dan rendahnya kesadaran ibu untuk memeriksakan bayinya ke fasilitas kesehatan.

Di sisi perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi jaring pengaman penting bagi keluarga miskin. Data penyaluran menunjukkan jangkauan yang luas, dengan

10.744 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahap pertama tahun 2023, dan 10.037 KPM pada tahap kedua di tahun yang sama. Data lain pada tahun 2025 mencatat 9.488 KPM menerima bantuan tahap kedua. Program ini sangat relevan dari perspektif gender, karena perempuan, khususnya ibu rumah tangga, seringkali menjadi pengelola utama bantuan tersebut untuk pemenuhan gizi dan pendidikan anak.

Tabel 1: Komposisi Penduduk Kabupaten Bengkayang Menurut Jenis Kelamin (2023)

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
Laki-laki	155.120	51,88
Perempuan	143.859	48,12
Total	298.979	100,00
Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang		

Tabel 2: Indikator Kunci Pembangunan Manusia dan Ekonomi Menurut Jenis Kelamin

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total/Gabungan	Tahun Data	Sumber
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	-	67,87	2021	BPS
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	-	-	7,22 tahun	2023	BPS
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	87,24%	63,29%	-	2020	RPJMD
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	-	2,81%	2024	BPS

Bagian 3: Analisis Kerangka Kebijakan Pembangunan Daerah dari Perspektif Gender

3.1. Visi, Misi, dan Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang periode 2021-2026 adalah **"Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka"**. Visi ini dijabarkan ke dalam tujuh misi pembangunan. Dari perspektif gender, Misi pertama, yaitu "Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan religius," menjadi yang paling relevan karena secara inheren mencakup perempuan dan anak sebagai subjek pembangunan. Dokumen RPJMD secara eksplisit juga mengakui pentingnya isu gender dengan menjadikan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Meskipun demikian, pengarusutamaan gender belum menjadi narasi utama yang terintegrasi secara menyeluruh dalam visi dan misi, yang cenderung masih berfokus pada pembangunan sumber daya manusia secara umum.

3.2. Program Prioritas dan Sensitivitas Gender

Komitmen pemerintah daerah terhadap kesetaraan gender tercermin dalam beberapa dokumen kebijakan dan alokasi anggaran. RPJMD 2021-2026 menyebutkan adanya program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan di bawah Misi 1 dan 2. Komitmen ini juga didukung oleh alokasi anggaran, sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan tahun 2023 yang mengalokasikan dana untuk "Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)" serta "Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG". Selain itu, terdapat payung hukum di tingkat lokal, yaitu Peraturan Pemerintah Kabupaten Bengkayang nomor 34 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan PUG, yang menjadi landasan formal bagi implementasi kebijakan ini.

Namun, analisis yang lebih dalam menunjukkan adanya kesenjangan implementasi di tingkat sektoral. Komitmen PUG yang kuat di tingkat kebijakan makro tampak belum terintegrasi secara konsisten di semua dinas teknis. Sebagai contoh, dokumen strategi pembangunan untuk sektor vital seperti pertanian dan ketahanan pangan dalam RPJMD tidak secara eksplisit menyebutkan 'pemberdayaan perempuan', 'petani perempuan', atau 'Kelompok Wanita Tani (KWT)' sebagai target atau strategi prioritas. Hal ini menjadi sebuah anomali, mengingat dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian sendiri mengakui keberadaan dan pentingnya KWT sebagai bagian dari kelembagaan petani yang dibina. Fenomena ini mengindikasikan adanya "penguapan kebijakan" (

policy evaporation), di mana semangat PUG yang ada di tingkat atas tidak sepenuhnya meresap ke dalam perencanaan operasional di tingkat bawah.

3.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kesenjangan Data

Beberapa perangkat daerah telah menunjukkan praktik baik dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang responsif gender. Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, misalnya, tidak hanya menggunakan indikator umum tetapi juga indikator yang sangat spesifik gender, seperti cakupan kunjungan ibu hamil (K₄), persentase remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD), dan cakupan deteksi dini kanker serviks pada perempuan usia 30-50 tahun.

Akan tetapi, praktik baik ini belum menjadi standar di seluruh OPD. Banyak laporan kinerja, terutama di tingkat sektoral, masih menyajikan data agregat tanpa pemilahan berdasarkan jenis kelamin. Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, misalnya, tidak memilah data penerima manfaat bantuan (bibit, pupuk, alsintan) maupun partisipasi dalam kegiatan penyuluhan. Demikian pula, Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Agregat tahun 2022 tidak menyajikan data jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin, meskipun data tersebut ada di level RPJMD. Kesenjangan data terpilah ini menjadi hambatan serius bagi perencanaan yang berbasis bukti dan menyulitkan evaluasi dampak pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan secara adil. Tanpa data yang terpilah, mustahil untuk mengetahui apakah program-program yang dijalankan telah berhasil mengurangi atau justru memperlebar kesenjangan gender.

Tabel 3: Matriks Program Strategis dalam RPJMD 2021-2026 dan Keterkaitannya dengan Isu Gender

Misi RPJMD	Sasaran Strategis Terkait	Program Prioritas	Indikator Kinerja Terkait	Analisis Keterkaitan/Kesenjangan Gender
Misi 1: Mewujudkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan religius.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB).	Keterkaitan Kuat: Program ini secara inheren berfokus pada perempuan dan anak. Indikatornya sangat responsif gender.
Misi 2: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	Keterkaitan Eksplisit: Program ini secara langsung menargetkan isu gender. Namun, implementasinya perlu dipastikan terintegrasi lintas sektor.
Misi 4: Mewujudkan kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, dll.	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.	Produksi Padi, Jagung, dll.	Kesenjangan: Tidak ada indikator atau target spesifik yang menyebutkan peran atau partisipasi petani perempuan/KWT, meskipun mereka adalah aktor penting di sektor ini.
Misi 5: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu menjadi Smart Desa.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana desa termasuk teknologi informasi.	Program Pengembangan Sistem Informasi Desa.	Persentase desa dengan jaringan internet.	Kesenjangan: Program tidak secara eksplisit menargetkan perempuan sebagai pengguna teknologi. Ada risiko kesenjangan digital gender jika literasi digital perempuan tidak ditingkatkan secara khusus.
Sumber: Analisis Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu 2021-2026				

Bagian 4: Peran Strategis Dinas KOMINFO dalam Mendorong Kesetaraan Gender dan Inklusi Digital

4.1. Mandat dan Fungsi Dinas KOMINFO

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bengkayang memegang mandat strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Tugas ini mencakup pengelolaan informasi dan komunikasi publik, serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Selain itu, Diskominfo juga mengemban fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, yang menjadikannya garda terdepan dalam menjamin transparansi dan menyediakan layanan informasi kepada publik.

4.2. Literasi Digital sebagai Pilar Pemberdayaan

Kesenjangan digital berbasis gender merupakan isu krusial di tingkat nasional. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet perempuan (85,5%) sedikit di bawah laki-laki (87,6%). Namun, kesenjangan ini lebih dari sekadar angka akses. Berbagai studi menunjukkan bahwa perempuan, terutama yang berada di daerah perdesaan, berpendidikan lebih rendah, dan dari kelompok usia lebih tua, menghadapi hambatan yang lebih signifikan dalam akses, kepemilikan perangkat, dan keterampilan digital. Mereka juga lebih rentan terhadap risiko online seperti disinformasi dan kekerasan berbasis gender.

Di Kabupaten Bengkayang, beberapa inisiatif literasi telah muncul. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, misalnya, telah meluncurkan program "**Gerakan Edukasi Literasi Inklusi Sosial Bersama Perpustakaan Bengkayang (Geulis Sayang)**". Program ini bertujuan meningkatkan minat baca dan mempercepat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), dengan target utama masyarakat umum, anak-anak, dan generasi muda. Upaya ini diperkuat dengan peluncuran aplikasi perpustakaan digital

"iBengkayang" untuk mempermudah akses terhadap bahan bacaan melalui gawai.

4.3. Mengatasi Kesenjangan Digital Gender

Tantangan utama dalam inklusi digital tidak hanya terletak pada penyediaan akses internet, tetapi juga pada pengembangan keterampilan (*digital literacy*), keterjangkauan perangkat, dan jaminan keamanan online. Perempuan seringkali tertinggal dalam penguasaan keterampilan digital yang esensial untuk kewirausahaan modern dan pasar kerja, serta menjadi target yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi di dunia maya.

Di sinilah peran Diskominfo menjadi sangat vital. Dengan mandat teknis dan sumber daya yang dimiliki, Diskominfo dapat merancang program literasi digital yang lebih komprehensif. Program tersebut harus melampaui pengenalan dasar penggunaan internet, dan mencakup modul-modul yang dirancang khusus untuk menjawab tantangan yang

dihadapi perempuan, seperti keamanan digital, privasi data, pemasaran produk secara online, literasi keuangan digital, dan literasi media kritis untuk melawan disinformasi.

4.4. E-Government dan Pelayanan Publik Inklusif

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menunjukkan komitmen untuk mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Transformasi digital ini memiliki potensi besar untuk menjadi alat pemberdayaan bagi perempuan. Layanan publik yang dapat diakses secara online—seperti pendaftaran layanan kesehatan, pengajuan izin usaha mikro, atau akses informasi bantuan sosial—dapat secara signifikan mengurangi hambatan mobilitas dan waktu yang seringkali membatasi perempuan akibat tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak.

Namun, efektivitas SPBE sangat bergantung pada tingkat literasi digital penggunanya. Jika perempuan tertinggal dalam adopsi dan keterampilan digital, maka digitalisasi layanan publik justru berisiko menciptakan lapisan eksklusi baru, memperlebar kesenjangan yang sudah ada. Oleh karena itu, keberhasilan SPBE tidak dapat dipisahkan dari upaya masif untuk meningkatkan literasi digital di kalangan perempuan.

Ada indikasi kuat bahwa inisiatif digital di Bengkayang, meskipun positif, berjalan secara terfragmentasi. Dinas Perpustakaan fokus pada literasi baca dan inklusi sosial melalui program "Geulis Sayang", sementara Diskominfo fokus pada aspek teknis infrastruktur dan layanan pemerintah melalui SPBE. Keduanya memiliki tujuan akhir yang sama: masyarakat yang terinformasi dan berdaya. Namun, tanpa koordinasi yang kuat, sinergi antar program tidak akan tercapai. Program "Geulis Sayang" bisa jadi kekurangan dukungan teknis dan jangkauan promosi digital yang dapat disediakan oleh Diskominfo. Sebaliknya, adopsi SPBE oleh masyarakat, terutama perempuan, akan terhambat jika tidak didukung oleh program literasi dasar yang masif seperti yang diinisiasi oleh perpustakaan. Untuk itu, Diskominfo harus memosisikan diri bukan hanya sebagai penyedia teknologi, tetapi sebagai koordinator strategis ekosistem digital kabupaten. Perannya adalah menyinergikan program literasi perpustakaan dengan agenda SPBE, memastikan platform digital pemerintah secara aktif mempromosikan program pemberdayaan dari dinas lain, dan membangun jembatan antara teknologi dan kebutuhan nyata masyarakat.

Tabel 4: Program Dinas KOMINFO dan Potensi Integrasi Gender

Program/Kegiatan Diskominfo	Deskripsi Saat Ini	Potensi Integrasi Gender	Indikator Keberhasilan Responsif Gender
Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik (PPID)	Menyediakan informasi publik sesuai mandat UU KIP.	- Membuat rubrik/konten khusus di website resmi dan media sosial yang membahas isu pemberdayaan perempuan, kesehatan ibu & anak, dan	- Jumlah konten/berita terkait isu gender yang dipublikasikan per bulan. - Jumlah unduhan dataset terpilah gender.

		perlindungan dari kekerasan. - Menyediakan data terpilah gender yang mudah diakses.	
Pengembangan SPBE (e-Government)	Sosialisasi penggunaan sertifikasi elektronik dan pengembangan layanan online.	- Merancang antarmuka layanan publik online yang ramah pengguna bagi mereka dengan tingkat literasi digital rendah. - Melakukan kampanye sosialisasi SPBE yang secara khusus menargetkan kelompok perempuan (misalnya melalui PKK).	- Persentase pengguna perempuan pada layanan SPBE kunci. - Tingkat kepuasan pengguna perempuan terhadap layanan SPBE.
Literasi Digital	Masih bersifat umum dan belum menjadi program utama yang terstruktur.	- Merancang kurikulum literasi digital spesifik gender (keamanan online, e-commerce, anti-hoax). - Bekerja sama dengan Dinas Koperasi & UMKM dan Dinas Pertanian untuk memberikan pelatihan pemasaran digital bagi UMKM perempuan dan KWT.	- Jumlah perempuan (pelaku UMKM, anggota KWT) yang mengikuti pelatihan. - Peningkatan pendapatan peserta setelah mengikuti pelatihan.

Sumber: Sintesis dari analisis dan rekomendasi strategis.

Bagian 5: Analisis Tematik: Peran, Partisipasi, dan Tantangan Perempuan dalam Pembangunan

5.1. Perempuan dalam Perekonomian Lokal

Perempuan di Kabupaten Bengkayang merupakan tulang punggung ekonomi keluarga dan komunitas, meskipun peran mereka seringkali kurang diakui secara formal dan menghadapi berbagai tantangan.

- **Sektor Pertanian:** Keberadaan Kelompok Wanita Tani (KWT), seperti KWT "Tomat Intan" dan "Karya Tani", menunjukkan partisipasi aktif perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga. Namun, mereka menghadapi kendala baik internal, seperti rendahnya kerja sama tim, maupun eksternal, seperti kurangnya akses terhadap teknologi pemasaran digital untuk menjual hasil panen mereka. Secara lebih luas di Kalimantan Barat, perempuan

petani juga menghadapi hambatan struktural dalam mengakses sumber daya produktif seperti lahan dan kredit perbankan.

- **Sektor Pariwisata:** Di daerah perbatasan, perempuan memainkan peran penting dalam ekosistem pariwisata, terutama dalam penyediaan jasa seperti pengelolaan kuliner, penjualan tiket, dan *homestay*. Keterlibatan ini menjadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan bagi keluarga. Namun, potensi mereka seringkali terhambat oleh keterbatasan pemahaman manajerial, sumber daya manusia yang belum terlatih, dan minimnya penguasaan teknologi.
- **Ekonomi Kreatif dan UMKM:** Perempuan adalah motor penggerak utama di sektor ekonomi kreatif Kalimantan Barat. Namun, semangat kewirausahaan mereka seringkali terbentur oleh kesulitan mengakses modal formal. Hal ini disebabkan banyak perempuan tidak memiliki aset (seperti sertifikat tanah) atas nama mereka sendiri yang dapat dijadikan agunan di lembaga keuangan.

5.2. Partisipasi dalam Tata Kelola Komunitas

Di tingkat akar rumput, perempuan menunjukkan kapasitas organisasi yang luar biasa melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) merupakan jaringan yang vital dan terstruktur hingga ke tingkat desa. PKK berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan pembina bagi perempuan, serta terlibat aktif dalam implementasi program-program pemerintah yang krusial, seperti pencegahan stunting melalui kegiatan Posyandu, kampanye gizi melalui Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN), dan pembinaan UMKM. Program-program unggulan PKK bahkan secara strategis diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Bengkayang, menunjukkan perannya yang integral dalam pembangunan daerah.

Keberadaan jaringan PKK yang solid ini merupakan modal sosial yang sangat berharga. Jaringan ini dapat menjadi mitra strategis yang efektif bagi pemerintah, termasuk Diskominfo, untuk menyebarkan informasi dan melaksanakan program literasi digital hingga ke pelosok desa.

5.3. Isu Kritis: Perlindungan dari Kekerasan dan Akses Keadilan

Salah satu tantangan paling serius yang dihadapi perempuan dan anak di Bengkayang adalah isu kekerasan. Data menunjukkan adanya kasus kekerasan yang dilaporkan; pada periode hingga September 2020 saja, tercatat 29 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data di tingkat nasional juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, di mana kasus kekerasan cenderung meningkat dengan korban mayoritas adalah pelajar.

Angka yang dilaporkan ini seringkali hanya puncak dari gunung es. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai urusan privat atau aib keluarga. Hambatan budaya ini menghalangi korban untuk mencari bantuan dan mengakses keadilan. Dalam konteks ini, Diskominfo dapat memainkan peran yang sangat penting melalui kampanye penyadaran publik secara masif. Dengan memanfaatkan berbagai saluran media, Diskominfo dapat mengedukasi masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan, menyebarkan informasi mengenai layanan perlindungan yang tersedia

(seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak/UPTD PPA), dan bahkan memfasilitasi saluran pengaduan yang aman dan anonim melalui platform digital.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa organisasi seperti PKK dan KWT merupakan aset modal sosial yang luar biasa, menunjukkan bahwa perempuan di Bengkayang memiliki jaringan dan kapasitas organisasi yang kuat di tingkat akar rumput. Namun, kekuatan ini sebagian besar masih termanifestasi dalam ruang fisik dan belum terkapitalisasi secara digital. Diskominfo, dengan perangkat teknologi dan informasinya, memiliki peluang unik untuk "mendigitalkan" modal sosial ini. Dengan menjembatani dunia digital dengan jaringan komunitas yang sudah ada, dampak dari kegiatan pemberdayaan perempuan dapat ditingkatkan secara eksponensial. Sebagai contoh, produk-produk KWT dapat dipromosikan melalui portal pariwisata yang dikelola Diskominfo, atau informasi kesehatan penting dari Dinas Kesehatan dapat disebarluaskan secara cepat dan masif melalui grup WhatsApp kader PKK yang difasilitasi oleh Diskominfo. Ini adalah strategi pemberdayaan yang cerdas dan efisien karena memanfaatkan dan memperkuat struktur sosial yang telah mapan.

Bagian 6: Sintesis, Wawasan, dan Rekomendasi Kebijakan Strategis

6.1. Sintesis Temuan Utama

Analisis profil data berbasis gender di Kabupaten Bengkayang menyajikan tiga kesimpulan utama. **Pertama**, terdapat paradoks antara kemajuan di beberapa indikator gender makro (seperti partisipasi tinggi perempuan di sektor ASN dan IDG yang baik) dengan tantangan struktural yang persisten di tingkat mikro (seperti kesenjangan TPAK, isu kesehatan ibu dan anak, dan kerentanan ekonomi). **Kedua**, teridentifikasi adanya kesenjangan implementasi antara komitmen kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat perencanaan pusat dengan praktik perencanaan, penganggaran, dan pelaporan di tingkat dinas-dinas sektoral. **Ketiga**, teknologi digital memainkan peran ganda: di satu sisi ia menawarkan potensi besar sebagai alat pemberdayaan, namun di sisi lain ia berisiko menciptakan bentuk eksklusi baru jika kesenjangan digital gender tidak ditangani secara proaktif dan terencana.

6.2. Rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Lintas Sektor)

1. **Penguatan Mekanisme PUG:** Mewajibkan seluruh OPD untuk mengintegrasikan analisis gender (menggunakan alat seperti *Gender Analysis Pathway/GAP*) dalam setiap siklus penyusunan Renstra dan Renja. Selain itu, menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilah gender sebagai syarat wajib dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan.
2. **Sinergi Program Pemberdayaan:** Membentuk gugus tugas lintas-sektoral yang terdiri dari Diskominfo, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP₃A), Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Pertanian, dan Dinas Perpustakaan. Gugus tugas ini bertanggung jawab merancang dan melaksanakan program pemberdayaan perempuan yang terintegrasi, menggabungkan komponen literasi digital, kewirausahaan, akses permodalan, dan akses pasar.

3. **Implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG):** Mendorong penerapan ARG tidak hanya pada program PUG secara umum, tetapi juga memastikan alokasi anggaran dalam program-program di dinas teknis (misalnya, program penyuluhan pertanian atau pengembangan pariwisata) secara eksplisit mendukung peningkatan partisipasi dan manfaat bagi perempuan.

6.3. Rekomendasi Khusus untuk Dinas KOMINFO

1. **Menjadi Pusat Data Gender:** Mengambil inisiatif untuk mengembangkan dan mengelola sebuah *dashboard* data terpilah gender tingkat kabupaten. Platform ini harus dapat diakses oleh semua OPD sebagai rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga dapat mengatasi masalah kesenjangan data yang saat ini terjadi.
2. **Merancang Strategi Literasi Digital Inklusif:** Mengembangkan kurikulum literasi digital yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan perempuan di Bengkayang, yang mencakup tiga pilar utama: (1) **Keterampilan dasar** untuk mengakses layanan publik digital (SPBE); (2) **Keterampilan kewirausahaan digital** (pemasaran online, e-commerce, branding produk) yang ditujukan khusus bagi pelaku UMKM perempuan dan anggota KWT; dan (3) **Keamanan digital** dan strategi perlindungan diri dari kekerasan berbasis gender online.
3. **Membangun Platform Pemberdayaan Digital:** Memfasilitasi atau membangun sebuah platform digital terpadu (dapat berupa portal web atau aplikasi seluler) yang berfungsi sebagai etalase untuk mempromosikan produk-produk UMKM perempuan dan KWT. Platform ini juga harus menjadi pusat informasi terpercaya mengenai peluang pelatihan, akses permodalan, lowongan kerja, serta informasi kontak layanan perlindungan perempuan dan anak.
4. **Melaksanakan Komunikasi Publik Strategis:** Menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dikelola Diskominfo (website resmi, media sosial, radio pemerintah) untuk secara rutin dan konsisten mengkampanyekan isu kesetaraan gender, menantang stereotip negatif, dan menyebarkan informasi penting mengenai layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

6.4. Rekomendasi untuk Organisasi Masyarakat Sipil dan Mitra Pembangunan

1. **Kolaborasi Konten:** Bekerja sama dengan Diskominfo dan dinas terkait dalam pengembangan materi dan konten literasi digital yang relevan dengan konteks sosial-budaya lokal dan menjawab kebutuhan nyata perempuan di tingkat akar rumput.
2. **Menjadi Jembatan Komunitas:** Berperan aktif sebagai jembatan antara pemerintah dan komunitas, membantu sosialisasi program-program pemberdayaan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif mengenai efektivitas dan tantangan implementasi program di lapangan.
3. **Advokasi Berbasis Bukti:** Melakukan advokasi kebijakan yang didasarkan pada data dan bukti lapangan untuk memastikan bahwa program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan informasi, dirancang dan diimplementasikan secara inklusif agar tidak meninggalkan kelompok perempuan yang paling rentan.

